



Roadmap
**PENELITIAN &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI
D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
2024 - 2028**



**PROGRAM STUDI D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
2023**

ROADMAP

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024-2028**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK
UNIVERSIAS BINA MANDIRI GORONTALO**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

MENGESAHKAN

ROADMAP
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
BAGI DOSEN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAERAH
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
TAHUN 2024-2028

Yang disusun oleh:

Dr. Ikram Muhammad, M.Si
Karlina Napu, S.AP., M.Si
Ely Ibrahim, S.AP., M.Si
Siskawaty Pakaya, S.AP., M.Si
Djamila Podungge, S.Si., M.Si

Gorontalo, 5 Agustus 2023

Mengetahui,
Dekan FPSP



Frista lin Wahyuni, SE., M.Pd

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Siska Anani, SE., MM

KATA PENGANTAR

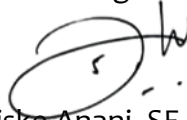
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kuasaNya sehingga Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Bina Mandiri Gorontalo dapat diselesaikan penyusunannya.

Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah ini merupakan arah, batasan dan lingkup penelitian yang dilakukan oleh Dosen Program Studi pada tahun 2024-2028. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah mengusung tema penelitian dan pengabdian pada masyarakat tahun 2024-2028 yaitu Inovasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa berbasis *Smart City* dan *Smart Village*. Dengan demikian maka pelaksanaan riset dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan secara terfokus dan berkelanjutan, serta relevan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Dokumen ini merupakan Dokumen wajib bagi Dosen di lingkungan Program Studi DVI Administrasi Pemerintahan Daerah sebagai dasar, referensi dan arahan dalam pelaksanaannya dari tahun 2024 hingga 2028.

Atas selesainya Dokumen Roadmap Penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah konsen dalam penyelesaian dokumen ini.

Gorontalo, 5 Agustus 2023
Ketua Program Studi



Siske Anani, SE., M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran Roadmap	4
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN ROADMAP	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Tujuan dan Sasaran	7
BAB III ROADMAP PENELITIAN	8
A. Kebijakan	8
B. Pelaksanaan	10
BAB IV ROADMAP PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	15
A. Kebijakan	15
B. Pelaksanaan	17
C. Evaluasi	19
BAB V PENDANAAN, PETUNJUK PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI	20
A. Pendanaan	20
B. Petunjuk Pelaksanaan	20
C. Sistem Penjaminan Mutu	22
BAB VI PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Roadmap penelitian memiliki peran penting dalam Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah (APD). Roadmap penelitian membantu mengarahkan perencanaan dan pengembangan program studi APD. Dengan memiliki roadmap yang jelas, program studi dapat menetapkan visi, tujuan, dan langkah-langkah yang spesifik untuk mencapai target akademik dan kualitas pendidikan yang diinginkan.

Roadmap penelitian membantu fokus pada aspek-aspek penelitian yang penting dan relevan dengan bidang administrasi pemerintahan daerah. Dengan mengidentifikasi area penelitian yang kritis, program studi dapat meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Roadmap penelitian membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dampak positif dan signifikan dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan fokus pada isu-isu aktual dan urgensi, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemecahan masalah di tingkat lokal dan regional.

Roadmap penelitian memberikan panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam menentukan prioritas penelitian dan aliran kegiatan akademik. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya dan waktu untuk penelitian yang relevan dan bermanfaat. Dokumen ini juga turut meningkatkan reputasi Program Studi: Dengan roadmap penelitian yang kuat, program studi APD dapat meningkatkan reputasinya dalam dunia akademik dan

industri. Penelitian yang konsisten dan berkualitas tinggi akan membawa pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat dan mitra pemerintahan.

Roadmap penelitian dapat membuka peluang kolaborasi dengan pihak luar seperti instansi pemerintah, lembaga riset, dan organisasi masyarakat. Ini dapat meningkatkan kerjasama dalam mencari solusi untuk masalah-masalah pemerintahan daerah yang kompleks.

Peningkatan Keterlibatan Mahasiswa: Roadmap penelitian memberikan panduan yang jelas kepada mahasiswa mengenai bidang-bidang penelitian yang relevan dan menarik. Ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan membantu mereka mengembangkan keterampilan penelitian yang berharga.

Dengan memiliki roadmap penelitian yang baik, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah dapat berfungsi sebagai pusat penelitian yang unggul dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya memajukan administrasi dan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

B. Tujuan Roadmap

Roadmap Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP Universitas Bina Mandiri Gorontalo dirancang untuk mewujudkan Visi Program Studi yaitu Menjadi Program Studi Sarjana Terapan unggulan di bidang Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter mandiri, profesional, dan berdaya saing di Asia Tenggara pada tahun 2040 serta menyelenggarakan Misi kedua Program Studi yaitu Melaksanakan penelitian terapan untuk pengembangan ilmu dan teknologi aplikatif sesuai dengan kebutuhan

pemangku kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Misi Ketiga yaitu Menerapkan dan menyebarkan desain praktik administrasi pemerintahan daerah dan desa yang inovatif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. bagi mahasiswa Selanjutnya Hasil penelitian dan PkM ini juga diintegrasikan dan mendukung misi pertama yaitu Menyelenggarakan proses pembelajaran terapan yang mampu mengembangkan desain praktik administrasi pemerintahan daerah dan desa yang unggul dan profesional.

Secara spesifik roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan arah, batasan dan lingkup, serta mensinergikan pelaksanaan dan luaran dari kegiatan penelitian dan pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa pada Program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah.

Secara rinci Roadmap ini bertujuan untuk:

- Mewujudkan Visi Keilmuan Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah yaitu Menjadi Program Studi Sarjana Terapan unggulan di bidang Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter mandiri, profesional, dan berdaya saing di Asia Tenggara pada tahun 2040.
- Membentuk dan mengembangkan payung riset (grand research) unggulan program studi, fakultas dan universitas;
- Meningkatkan tingkat kefokusian penelitian dan pengabdian pada masyarakat Dosen PS APD;
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat Dosen dan mahasiswa berupa publikasi pada jurnal

terakreditasi dan jurnal bereputasi internasional, bahan ajar, maupun HKI.

- Meningkatkan relevansi pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Meningkatkan peran PS Administrasi Pemerintahan Daerah dan FPSP dalam pembangunan Desa, Daerah dan Nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

C. Sasaran Roadmap

Sasaran Roadmap Penelitian dan PkM PS Administrasi Pemerintahan Daerah adalah:

- Terbentuknya arahan topik penelitian dan pengabdian pada masyarakat unggulan bagi Dosen pada PS APD FPSP UBM Gorontalo;
- Terpetakannya sumber daya kepakaran Dosen di PS APD FPSP UBM Gorontalo;
- Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermakna dan bermanfaat dalam peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah dan desa di Indonesia;
- Terwujudnya budaya penelitian sebagai dasar untuk mencapai visi keilmuan program studi.
- Meningkatnya temuan teknologi dan seni yang prospektif, aplikatif dan efektif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi di pemerintahan daerah, baik administrasi pembangunan, pelayanan, pengelolaan sumber daya dan lainnya.

- Bertambahnya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional bereputasi, dan hak paten/hak kekayaan intelektual.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN ROADMAP

A. Visi

Visi program studi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Bina Mandiri Gorontalo, berisi visi keilmuan serta merupakan turunan dari visi Universitas dan Fakultas. Visi keilmuan PS Administrasi Pemerintahan Daerah adalah:

“Menjadi Program Studi Sarjana Terapan unggulan di bidang Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter mandiri, profesional, dan berdaya saing di Asia Tenggara pada tahun 2040.”

B. Misi Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Untuk mewujudkan visi keilmuan PS Administrasi Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan sejumlah misi program studi, yaitu:

- Misi 1 Menyelenggarakan proses pembelajaran terapan yang mampu mengembangkan desain praktek administrasi pemerintahan daerah dan desa yang unggul dan profesional
- Misi 2 Melaksanakan penelitian terapan untuk pengembangan ilmu dan teknologi aplikatif sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan
- Misi 3 Menerapkan dan menyebarkan desain praktek administrasi pemerintahan daerah dan desa yang inovatif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang adminisrasi pemerintah Daerah dan Desa.
- Misi 4 Meningkatkan kerja sama yang simbiosis mutulisme dalam mendukung penyelenggaraan tri darma

C. Tujuan Program Administrasi Pemerintahan Daerah

Tujuan PS Administrasi Pemerintahan Daerah:

- Tujuan 1 Terselenggaranya program pembelajaran terapan yang berorientasi pada *outcome based education (OBE)* dan memiliki *link and match* dengan pemerintahan daerah dan desa.
- Tujuan 2 Menghasilkan lulusan PS Administrasi Pemerintahan Daerah yang berkarakter mandiri, profesional, berdaya saing (M1).
- Tujuan 3 Terselenggaranya penelitian terapan yang mendukung keilmuan, kekhasan PS dan kebutuhan pemangku kepentingan (M2)
- Tujuan 4 Terselenggaranya pengabdian pada masyarakat yang berbasis luaran riset dan berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara aplikatif dan inovatif (M3)
- Tujuan 5 Terjalin kerja sama yang simbiosismutualisme (M4).

BAB III

ROADMAP PENELITIAN

A. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud dalam dokumen ini adalah kebijakan tertulis dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Peraturan di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo (Rektor, Dekan/Direktur, Kepala Lembaga) yang mengatur tentang Penelitian pada Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik UBM Gorontalo.

Adapun kebijakan yang menjadi acuan dalam pengelolaan penelitian pada Program Studi DIV Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1033/KPT/I/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan STIM Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri Gorontalo menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo;

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 07/D/OT/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Sarjana Terapan pada Universitas Bina Mandiri Gorontalo di Kota Gorontalo yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Mandiri Gorontalo
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Nomor 60/YBM/UBM/STATUTA/XI/2019 tentang Penetapan/ Pengesahan STATUTA Universitas Bina Mandiri Gorontalo Tahun 2019;
10. Keputusan Rektor Nomor 130/UBM/JM.00/2021 tentang Kebijakan Mutu Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 203/UBM/HK.06/2021 tentang Standar Mutu Universitas Bina Mandiri Gorontalo
12. Rencana Induk Penelitian Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
13. Rencana Strategi Penelitian Universitas Bina Mandiri Gorontalo
14. Pedoman Pengelolaan Penelitian Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
15. Standard Operating Procedure Penelitian Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Kebijakan tersebut di sosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui:

- a. Website Universitas Bina Mandiri Gorontalo <http://ubmg.ac.id>
- b. Repository Badan Penjaminan Mutu UBM Gorontalo <http://ubmg.ac.id/bpmu>
- c. Telegram Grup LPPM UBM Gorontalo
- d. Facebook LPPM UBM Gorontalo

- e. Sosialisasi Online (melalui zoom meeting) maupun Offline bagi seluruh Dosen UBM Gorontalo;
- f. Sosialisasi pada level fakultas dan program studi (rapat Fakultas dan/ata program studi).

B. Pelaksanaan

1. Bidang Unggulan Penelitian

Bidang Kajian Unggul penelitian PS Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah pada empat bidang, yaitu:

- a. Inovasi Regulasi/ Kebijakan Pemerintah Daerah dan Desa
Riset pada bidang ini konsep pada inovasi formulasi, implementasi, maupun evaluasi kebijakan/regulasi.
- b. Inovasi Organisasi dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Desa
Riset pada bidang ini konsen pada inovasi pemerintah daerah dan desa pada pengembangan kelembagaan, desain organisasi dan perilaku organisasi.
- c. Inovasi Manajemen Sektor Publik di Pemerintahan dan Desa
- d. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Desa
Riset pada bidang ini konsen pada inovasi pemerintah daerah dan desa dalam inovasi perubahan sistem pelayanan, penyediaan layanan, pengukuran kepuasan, perbaikan dan pengembangan sistem, manajemen dan praktik pelayanan publik.

2. Peta Jalan dan Kelompok Penelitian

Pelaksanaan Penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) didasarkan pada Peta Jalan (roadmap) dan kelompok penelitian (*research group*). Merujuk pada Rencana Induk Penelitian

Universitas Bina Mandiri Gorontalo bahwa tema penelitian unggulan Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah: **Ekonomi dan Bisnis, Pemerintahan dan Kesehatan**. Bidang Unggulan Penelitian Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah:

- (1) Administrasi Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Publik
- (2) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
- (3) Pengembangan Model Kepemimpinan Transformatif di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- (4) Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Lingkungan Hidup
- (5) Pendidikan, Sosial, dan Budaya Lokal
- (6) Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Publik
- (7) Kesehatan Masyarakat dan Layanan Sosial

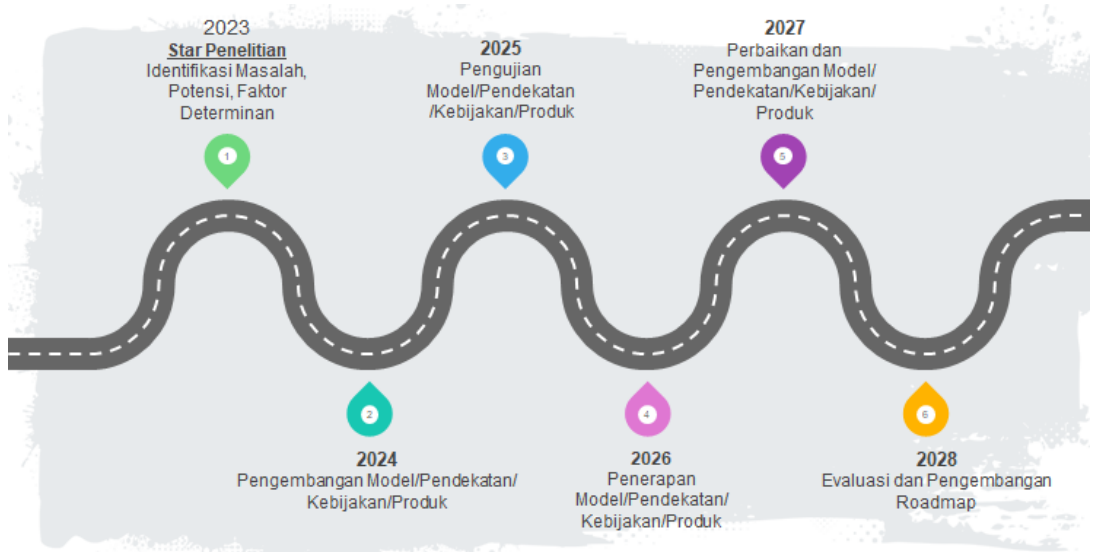
Bidang-bidang penelitian unggulan tersebut melibatkan mono dan multidisiplin yang dikembangkan pada setiap program studi, lintas program studi dan fakultas. Dengan demikian, maka penelitian DPTS Administrasi Pemerintahan Daerah adalah pada unggulan sosial humaniora, seni budaya dan tata kelola pemerintahan, dengan Topik Riset: Administrasi Pemerintahan Desa dan Entrepreneur Governance.

Peta Jalan penelitian ini dibuat untuk memberikan arah dan pengendalian terhadap penelitian-penelitian DPTS Administrasi Pemerintahan Daerah UBM Gorontalo. Pelaksanaan peta penelitian ini dimulai dengan pembentukan kelompok penelitian dosen yang memiliki fokus atau arah penelitian yang sama. Dosen juga dianjurkan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya sebagai tim peneliti yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga publikasi luaran penelitian.

Adapun Kelompok Penelitian DTPS Administrasi Pemerintahan Daerah selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Regulasi/Kebijakan dan Kelembagaan Desa
2. Pembangunan Daerah dan Desa
3. Manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa
4. Pelayanan Publik

Dengan demikian maka roadmap penelitian pada Program Studi DIV Administrasi Pemerintahan Daerah ditunjukkan pada gambar berikut:



3. Sasaran dan Lokasi

PS APD menetapkan bahwa fokus penelitian Administrasi Pemerintahan Daerah adalah Inovasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa berbasis *Smart City* dan *Smart Village*, sehingga sasaran dan lokasi penelitian adalah aparatur pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan desa/kelurahan di Provinsi Gorontalo maupun Provinsi Lain di Indonesia. Penelitian ini

difokuskan kepada aparatur pemerintahan daerah dan desa karena merupakan penyelenggara dan pengelola administrasi pemerintahan di setiap tingkatan pemerintah.

4. Keterlibatan Fakultas/Lintas Sektor

Penelitian Administrasi Pemerintahan Daerah sangat potensial dilakukan dalam berbagai kacamata bidang ilmu, sehingga Fakultas yang potensial dilibatkan dalam pelaksanaan Penelitian APD adalah: (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (2) Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan, dan (3) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya. Sementara itu, institusi lain yang akan terlibat dalam kegiatan penelitian ini seluruh Satuan Kerja di Pemerintahan Daerah, namun secara spesifik adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi, Dinas Pemerintahan Desa.

5. Faktor Pendukung Penelitian APD

Faktor pendukung pelaksanaan penelitian APD relevansi keilmuan DTPS yang memiliki kualifikasi pendidikan Magister dan Doktoral, serta fokus dan lokus penelitian yang relatif mudah diakses dan tersedia dengan memadai.

6. Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBMG) dilaksanakan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan dilakukan oleh tim penilai atau reviewer yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBMG, bersama dengan Badan Penjaminan Mutu serta unit-unit terkait seperti pusat studi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian produktivitas, relevansi penelitian terhadap roadmap yang telah ditetapkan, serta sejauh mana mahasiswa

dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan riset. Penilaian meliputi capaian hasil, kesesuaian dengan peta jalan penelitian program studi, dan luaran yang dihasilkan seperti publikasi ilmiah, HKI, maupun implementasi kebijakan. Jika ditemukan penelitian yang menyimpang dari peta jalan yang disusun, maka akan dilakukan peninjauan kembali untuk memastikan tetap berada dalam koridor visi riset institusi.

BAB IV

ROADMAP PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur PPM di Program Studi dan Fakultas. Kebijakan dan sistem pengelolaan PPM yang ada di Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah mengacu pada:

- a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNG pada Depdiknas sebagai Instransi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU
- h. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

- i. Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Kementristekdikti
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Standar Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Manual Mutu Penelitian UBMG
- l. Rencana Strategis LP2M UBMG
- m. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- n. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- o. Standard Operating Procedure (SOP) LPPM Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- p. SK Dekan tentang Standard Operating Procedure (SOP) Jurusan Administrasi Pemerintah Daerah UBMG

Kebijakan tersebut disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara sebagai berikut.

- a. Website Universitas Bina Mandiri Gorontalo <http://ubmg.ac.id>
- b. Repository Badan Penjaminan Mutu UBM Gorontalo <http://ubmg.ac.id/bpmu>
- c. Sosialisasi Online (melalui zoom meeting) maupun Offline bagi seluruh Dosen UBM Gorontalo;
- d. Sosialisasi pada level fakultas dan program studi (rapat Fakultas dan/ata program studi)
- e. Selain sosialisasi di tingkat perguruan tinggi, sosialisasi juga dilakukan di tingkat Program Studi, melalui akun media sosial

Program Studi, misalnya Facebook dan WA Grup Dosen Program Studi.

B. Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) di Universitas Bina Mandiri Gorontalo didasarkan pada peta jalan (roadmap) PPM yang telah disusun secara sistematis untuk mendukung visi universitas menjadi pusat unggulan dalam pengembangan IPTEKS dan kewirausahaan berbasis budaya lokal di Asia Tenggara.

Pelaksanaan PPM di Program Studi APD merujuk pada kegiatan PPM yang ada di LPPM UBMG, Berikut kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah: KKN MBKM Membangun Desa, KKM Internasional, dan KKM Reguler. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat dilaksanakan secara individu, namun untuk memberikan dampak yang lebih luas, disarankan dilaksanakan secara berkelompok, baik berdasarkan rumpun keilmuan, program studi, fakultas, pusat studi, maupun kelompok minat tertentu, serta diupayakan untuk melibatkan mahasiswa. Dalam implementasinya, LPPM tidak bertindak sebagai pelaksana langsung di lapangan, melainkan berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pengabdian tersebut.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) di Program Studi Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBMG) merujuk pada pedoman standar mutu PPM yang ditetapkan oleh LPPM UBMG. Setiap aktivitas pengabdian yang dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) harus sejalan dengan peta jalan (roadmap) PPM yang

mendukung arah kebijakan dalam Rencana Strategis PPM UBMG. Penyusunan proposal dan laporan akhir kegiatan mengacu pada panduan resmi penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM UBMG.

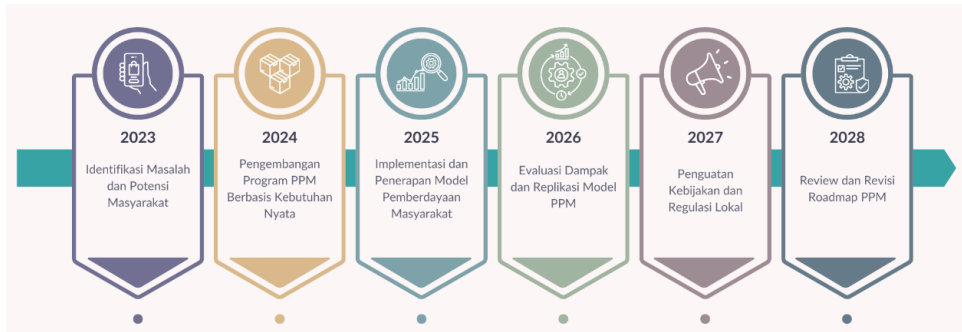
Skema pelaksanaan PPM disesuaikan dengan skema Hibah Pengabdian yang dikeluarkan oleh DIKTI serta mengadopsi topik unggulan UBMG, yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan PPM harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara tim pelaksana dan mitra masyarakat yang dilibatkan. Setiap luaran kegiatan wajib memenuhi kriteria yang tercantum dalam buku panduan standar mutu PPM UBMG.

Indikator pencapaian kinerja dalam kegiatan PPM mencakup:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas program pengabdian,
2. bertambahnya jumlah publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku, jumlah mitra, serta luaran IPTEK lainnya, dan
3. meningkatnya penyebaran atau diseminasi hasil teknologi dari kegiatan PPM tersebut.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBMG) mengacu pada peta jalan (roadmap) PPM yang telah dirancang sebagai acuan strategis. Roadmap ini disusun guna mewujudkan UBMG sebagai institusi yang unggul dan kompetitif, serta memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan PPM, baik yang dilaksanakan secara individu maupun lintas program studi dan disiplin ilmu. Tujuan utama roadmap ini adalah menyinergikan berbagai kegiatan pengabdian agar memiliki keterkaitan tematik, kesinambungan waktu, dan dampak nyata yang relevan bagi masyarakat.

Selain berfungsi sebagai panduan, roadmap PPM juga menjadi dasar dalam membentuk dan mengembangkan *Grand Service Community*, yaitu kerangka kerja pengabdian berbasis keilmuan program studi yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat. Skema peta jalan (roadmap) PPM UBMG dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. Skema Roadmap PPM Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah UBMG

C. Evaluasi

Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan PPM yang dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi berdasarkan pada peta jalan (roadmap) penelitian yang telah dibuat: produktivitas, relevansi, dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PPM dosen.

BAB V

PENDANAAN, PETUNJUK PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) di lingkungan sivitas akademika Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, terutama bagi para peneliti, membutuhkan sejumlah faktor pendukung agar dapat berjalan secara optimal dan berkualitas sesuai dengan peta jalan (roadmap) yang telah disusun. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) ketersediaan pendanaan, (2) panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan, dan (3) sistem penjaminan mutu yang menjamin konsistensi dan standar pelaksanaan kegiatan.

A. Pendanaan

Program-program penelitian dan pengabdian yang telah disusun dalam kebijakan pedoman Roadmap penelitian ini akan didanai dari berbagai sumber pendanaan, baik dari Lembaga Luar Negeri (LN), Kementerian/Lembaga Dalam Negeri (DN), Instansi/Universitas, Pemda, Industri, dan Mandiri. Kerjasama kemitraan dengan pihak Industri maupun Pemda juga dapat mendukung penelitian dan pengabdian dalam proses komersialisasi produk hasil penelitian dan pengabdian.

B. Petunjuk Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian ataupun pengabdian dimulai dengan mengajukan proposal oleh individu, kelompok keahlian, Pusat Studi, atau Pusat Penelitian Fakultas dengan mengacu kepada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2020. Alur proses pengajuan proposal dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 3 Tahapan kegiatan penelitian yang didanai oleh Kemenristek/BRIN



Gambar 4 Tahapan kegiatan penelitian Biaya PNPB/BLU UBGM



Gambar 5 Tahapan kegiatan pengabdian yang didanai oleh Kemenristek/BRIN



Gambar 6 Tahapan kegiatan pengabdian Biaya PNPB/BLU UBMG

C. Sistem Penjaminan Mutu

Upaya menjamin pelaksanaan penelitian yang berkualitas, diperlukan suatu sistem penjaminan mutu penelitian yang dilaksanakan mulai dari tingkat Program Studi, Fakultas, hingga tingkat Universitas. Proposal penelitian sebaiknya diseminarkan terlebih dahulu di tingkat Program Studi/Fakultas, kemudian dievaluasi dan diseleksi di tingkat Lembaga Penelitian (Sekretariat Program) melalui seleksi administratif dan evaluasi meja (Desk Evaluation) oleh tim pakar (reviewer). Rekomendasi dari tim pakar ini menghasilkan tiga kemungkinan keputusan terhadap proposal yang dinilai, yaitu: (1) Layak didanai, (2) Disarankan untuk direvisi sesuai dengan kriteria sebelum dilakukan penilaian ulang, dan (3) Tidak layak didanai.

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh tim evaluator melalui kunjungan lapangan (site visit), peninjauan laporan kemajuan, evaluasi proses pelaksanaan penelitian serta logbook peneliti, penilaian terhadap laporan akhir dan hasil publikasi.

Tujuan akhir dari penyusunan roadmap ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta

pengabdian di lingkungan Sivitas Akademika Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka unit-unit kerja yang terkait dalam bidang penelitian dan pengabdian perlu melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Menyebarkan informasi (sosialisasi) roadmap kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP.
2. Membentuk tim kerja (*task force*) untuk perbaikan dan implementasi roadmap tema unggulan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP, mencakup dosen, tenaga kependidikan, asisten, dan mahasiswa.
4. Mengupayakan ketersediaan sarana pendukung penelitian, seperti laboratorium, peralatan, serta pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada kelompok bidang keahlian.
5. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
6. Meningkatkan mutu sarana publikasi ilmiah di bidang ilmu yang relevan di lingkungan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP.
7. Mengembangkan jaringan informasi dan kerja sama penelitian dengan institusi baik di lingkungan internal maupun eksternal Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP.
8. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan program studi.

9. Melaksanakan evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan penelitian sebagai dasar perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

BAB VI

PENUTUP

Peningkatan jumlah dan mutu kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FPSP tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Proses ini akan berjalan lebih efisien dan efektif apabila dipersiapkan melalui perencanaan yang matang dan terstruktur. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kerangka kebijakan roadmap ini diharapkan menjadi panduan dalam merancang program penelitian yang integratif dan menyeluruh, baik yang bersifat multidisipliner maupun interdisipliner. Apabila seluruh unit kerja yang terlibat dalam bidang penelitian dan pengabdian dapat memahami dan menindaklanjuti roadmap ini dengan komitmen yang kuat, serta melaksanakan setiap tahap sesuai target yang telah ditentukan, maka dalam lima tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah diharapkan berkembang secara signifikan.

Selain itu, kerangka kebijakan ini akan memberikan manfaat nyata jika dijadikan sebagai dokumen rencana aksi yang operasional, bukan sekadar wacana normatif. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun secara kolaboratif dan sinergis di dalam organisasi.

